

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH ACEH

2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang harus disusun setiap akhir tahun anggaran untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan kinerja tahunan yang sudah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap sasaran strategis. Namun demikian dalam penyajian ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian, kiranya LAKIP ini dapat memberi manfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel.

Terima kasih,

Banda Aceh, Februari 2015

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Sekretariat Daerah Aceh

Dr. Mahyuzar, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19681016 199503 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

LAKIP Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh disusun berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2014 merupakan salah satu kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki melalui program, kebijakan dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai bagian integral dari Sistem AKIP.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis dan 4 indikator kinerja diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **98,00%** atau dengan kategori *baik*. Dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja keuangan, yang dijabarkan dalam 3 program dan 7 kegiatan dengan realisasi penggunaan anggaran mencapai **Rp. 8.051.730.892,-** atau **94,80%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 8.493.818.210,-** menghasilkan efisiensi kinerja sebesar **5,20%** yang merupakan salah indikator keberhasilan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh dalam mencapai target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan alokasi anggaran yang direalisasikan.

Pencapaian kinerja yang sangat baik didukung dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Namun belum diikuti dengan tingkat capaian pada setiap indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan yang mengakibatkan rendahnya tingkat capaian terhadap beberapa indikator pada setiap sasaran strategis, antara lain belum berjalannya pengawasan yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan yang kurang berbasis kinerja, dan kompetensi SDM yang masih lemah.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh.

Demikian, terima kasih.

Banda Aceh, Februari 2015
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Aceh

Dr. Mahyuzar, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681016 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Arah Dukungan Kebijakan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014
- B. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2011

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah di era reformasi ini. Untuk mewujudkan agenda tersebut, sejak akhir tahun 1999, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggung jawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakannya. Dalam sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh tahun 2014 disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik capaian kinerja kegiatan maupun capaian kinerja sasaran. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh telah melaporkan pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Biro Hubungan Masyarakat sebagai unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di Bidang Manajemen Kehumasan, dengan tugas pokok penyiapan naskah dan makalah pimpinan, hubungan media masa, penyiaran, analisis berita, publikasi, pelayanan aspirasi masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan biro;
- b. Pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pembinaan dalam pengelolaan dan penganalisaan informasi di bidang kehumasan;
- d. Pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab;
- e. Pembinaan dan pengendalian dalam pelayanan informasi kebijakan pemerintah;
- f. Pembinaan dan pengendalian penyusunan naskah dan makalah pimpinan;
- g. Pembinaan pelaksanaan hubungan media masa dan penyiaran;
- h. Pembinaan pelaksanaan analisis berita, publikasi, dan pelayanan aspirasi masyarakat;
- i. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- j. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga dan atau instansi terkait lainnya;
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehumasan;

- l. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pembentukan citra dan reputasi positif Wali Naggroe, Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh dan Sekda Aceh;
- m. Pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah, politik, pembangunan dan kemasyarakatan dengan instansi atau lembaga terkait lainnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Administrasi Umum.

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

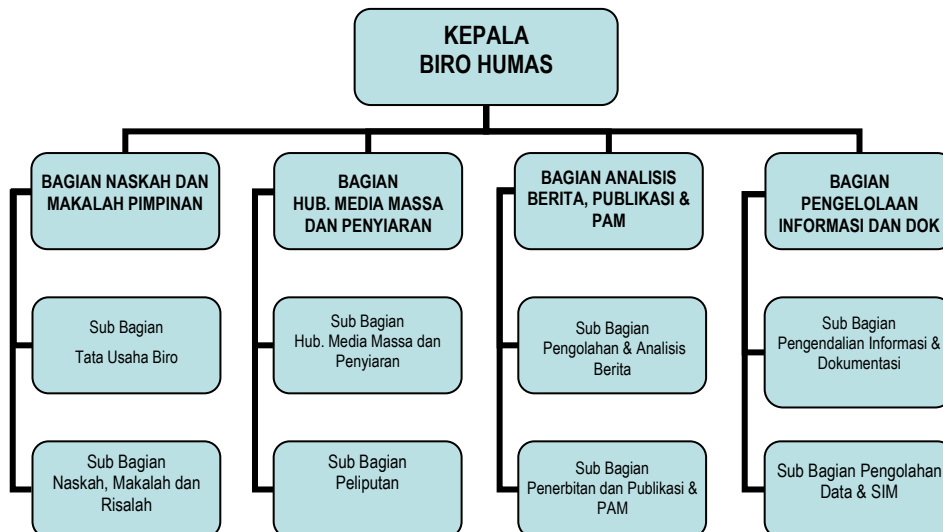
1. Kelembagaan

Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, Biro Hubungan Masyarakat berada pada jenjang eselonering II.b, terdiri dari 4 (empat) jabatan struktural eselon III.a dan 8 (delapan) jabatan struktural eselon IV.a dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Biro, membawahi :

1. Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan terdiri dari ;
 - 1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - 1.2. Sub Bagian Naskah, Makalah dan Risalah.
2. Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran terdiri dari;
 - 2.1. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran.
 - 2.2. Sub Bagian Peliputan.
3. Bagian Analisis Berita, Publikasi dan PAM terdiri dari;
 - 3.1. Sub Bagian Pengolahan dan Analisis Berita.
 - 3.2. Sub Bagian Penerbitan dan Publikasi Dan PAM.
4. Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari;
 - 4.1. Sub Bagian Pengendalian Informasi dan Dokumentasi.
 - 4.2. Sub Bagian Pengolahan Data dan SIM.

Struktur dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat di bawah ini :



2. Sumber Daya Aparatur

Potensi sumber daya aparatur merupakan kondisi riil yang harus dimiliki oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Biro Hubungan Masyarakat sampai dengan akhir tahun 2014 memiliki 27 pegawai negeri sipil dengan klasifikasi menurut jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan serta alokasi menurut bagian yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Biro Hubungan Masyarakat
Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Tingkat Pendidikan				
			L	P	II	III	IV	Serta	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala Biro	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Bagian Naskah, Makalah dan Risalah	8	7	1	2	6	-	2	-	3	3	-
3	Bagian Hub. Media	7	7	-	-	6	1	-	-	6	1	-

	Massa dan Penyiaran											
4	Bagian Analisis Berita, Publikasi dan PAM	5	3	2	1	4	-	1	-	3	1	-
5	Bagian Pengelolaan Informasi dan Dok	6	4	2	2	3	1	1	1	2	2	-
6	Pegawai Perbantuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	27	22	5	5	19	3	4	1	14	7	1

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat, Desember 2014

Dari tabel 1.1 di atas, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih mendominasi dari jumlah pegawai perempuan yaitu laki-laki sebanyak 22 orang atau 82%, dan pegawai perempuan sebanyak 5 orang atau 18%. berdasarkan golongan, lebih didominasi pegawai negeri sipil golongan III yaitu sebanyak 19 orang atau 70%. Sedangkan tingkat pendidikan, pegawai jenjang pendidikan lulusan Strata 1 (S-1) sebanyak 14 orang atau 52% dan Strata 2 (S-2) sebanyak 7 orang atau 26%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai baik menurut golongan maupun tingkat pendidikan relatif sudah mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok
2. Fungsi

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

1. Kelembagaan

2. Sumber Daya Aparatur

D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

1. Visi dan Misi
2. Tujuan
3. Sasaran strategis
4. Indikator Kinerja Utama

B. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Hasil Pengukuran Kinerja

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

- Rencana Kinerja Tahunan 2014
- Penetapan Kinerja tahun 2014
- Pengukuran Kinerja tahun 2014

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan merupakan proses persiapan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan perencanaan strategis Biro Hubungan Masyarakat tahun 2014, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaian kinerja pada tahun 2014. Sasaran strategis dan indikator kinerja dijabarkan lebih lanjut kedalam penetapan kinerja yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target pencapaian, program/kegiatan dan alokasi anggaran yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Aceh serta visi Sekretariat Daerah Aceh yaitu "Profesional dalam Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Perwujudan Masyarakat Aceh yang Madani' maka Biro Hubungan Masyarakat mempunyai visi sebagai berikut : **"Terwujudnya Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Aceh sebagai unit organisasi penyebarluasan informasi, publikasi dan transparansi informasi Pemerintah Aceh"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah misi yaitu:

- 1. Membangun Biro Hubungan Masyarakat yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Aceh.**
- 2. Meningkatkan hubungan yang komunikatif dan harmonis dengan media massa.**

3. **Meningkatkan pelayanan penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan.**
4. **Membangun komunikasi yang efektif dengan publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat.**
5. **Meningkatkan pelayanan informasi, komunikasi dan publikasi melalui media cetak, elektronik dan online.**

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dengan dirumuskan tujuan stratejik, maka dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, dengan demikian Biro Hubungan Masyarakat menetapkan 4 (empat) tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dalam penyusunan naskah, makalah dan risalah;
- b. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan media massa;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis berita publikasi dan pelayanan aspirasi masyarakat;
- d. Meningkatkan pengelolaan informasi dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Aceh;

3. Sasaran strategis

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dalam penyusunan naskah, makalah dan risalah;
- b. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan media massa ;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas analisis berita publikasi dan pelayanan aspirasi masyarakat;

- d. Meningkatnya pengelolaan informasi dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Aceh;

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ditetapkannya IKU Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- a. Persentase Jumlah pidato yang dihasilkan.
- b. Persentase peliputan kegiatan Pemerintah Aceh yang dihasilkan.
- c. Jumlah analisis berita publikasi dan pelayanan aspirasi masyarakat yang dihasilkan.
- d. Persentase pengelolaan informasi dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Aceh.

f. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-17 dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2014 sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya pelayanan oleh Aparatur kepada Publik	Jumlah alat kerja yang tersedia <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Laptop - Kamera Video - Camera Digital - Ups 	6 unit 7 unit 1 unit 8 unit 2 unit
Meningkatnya kualitas dalam penyusunan naskah, makalah dan risalah	Jumlah Naskah Pidato dan Makalah Pimpinan	1800 Pidato 60 Makalah
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi melalui media cetak maupun online	Jumlah Iklan dan Pariwara	750 Iklan/Pariwara
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menalaah dan menganalisis aspirasi masyarakat	Jumlah Analisis Berita	862 Analisis
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Transparansi Informasi	Jumlah Media Pemyampain Informasi	1 Web
Meningkatkan profesionalisme wartawan dalam peliputan dan pemberitaan	Jumlah peserta kegiatan	430 Orang
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Jumlah peserta kegiatan	280 Orang

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, Biro Hubungan Masyarakat Setda Aceh telah menetapkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2014 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 2.2.
Penetapan Kinerja
Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan	1. Jumlah alat kerja yang tersedia Komputer PC All in One Laptop Camera Digital Ups Printer Scanner	2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	736,746,000 736,746,000
Meningkatnya penyebaran informasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan	1. Jumlah Iklan Kegiatan Pemerintah Aceh melalui Media Cetak 2. Jumlah Press Release tentang Pemerintah Aceh 3. Jumlah Foto Kegiatan Pimpinan yang dicetak	600 Iklan 528 buah press release 20.000 lembar foto	II. Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa 1. Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan pers dan masyarakat	1,675,790,000 1,675,790,000
Meningkatnya pelaksanaan penyebaran, publikasi dan transparansi informasi	1. Media Penyampaian Informasi Pemerintah Aceh kepada Masyarakat	1 Website	III. Program Pengembangan Data dan Informasi 1. Kegiatan pengelolaan sistem informasi Pemerintah Aceh	564,620,000 564,620,000
Meningkatnya koordinasi penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan	1. Jumlah Pidato dan Makalah Gubernur yang disiapkan untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda serta yang mewakilinya 2. Jumlah makalah yang disiapkan 3. Jumlah buku kerja yang dicetak	1800 Pidato 150 Makalah 500 buah	IV. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan	1,602,298,000 885,600,000
Meningkatnya publikasi kegiatan	1. Jumlah Analisis Berita yang dihasilkan	864 buah analisis berita	2. Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat	716,698,000

pemerintah dan terpenuhinya aspirasi masyarakat	2. Jumlah kliping koran yang dicetak	500 buah		
	3. Jumlah Leaflet yang dicetak	2500 lbr		
	4. Jumlah poster yang dicetak	5000 lbr		
	5. Jumlah baliho/spanduk yang dicetak	40 lbr		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan searah dengan berbagai perencanaan dan target yang telah ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

B. EVALUASI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh mengukur tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan pengukuran terhadap Penetapan Kinerja dilakukan terhadap 13 indikator kinerja berdasarkan 5 sasaran strategis.

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan".

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian setiap indikator kinerja berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyelesaikan
tugas-tugas kedinasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan	Jumlah alat kerja yang tersedia :			
		Komputer PC All in One	2 Unit	2 Unit	100%
		Laptop	2 Unit	2 Unit	100%
		Camera Digital	2 Unit	2 Unit	100%
		Ups	2 Unit	2 Unit	100%
		Printer	2 Unit	2 Unit	100%
		Scaner	1 Unit	1 Unit	100%
rata-rata tingkat capaian kinerja					100,00

Sumber : LAKIP Biro Hubungan Masyarakat Setda Aceh Tahun 2014

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan" diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

2. Sasaran Strategis "Meningkatnya penyebaran informasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan".

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya penyebaran informasi kepada masyarakat
di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Meningkatnya penyebaran informasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan	Jumlah Iklan Kegiatan Pemerintah Aceh melalui Media Cetak	600 iklan	600 iklan	100,00
		Jumlah Press Release tentang Pemerintah Aceh	528 buah Press Release	528 buah Press Release	100,00
		Jumlah Foto Kegiatan Pimpinan yang dicetak	20.000 lembar foto	20.000 lembar foto	100,00
rata-rata tingkat capaian kinerja					100,00

Sumber : LAKIP Biro Hubungan Masyarakat Setda Aceh Tahun 2014

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya penyebaran informasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan" diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

- Indikator Jumlah iklan/pariwara Pemerintah Aceh yang dimuat media cetak dan online ditargetkan sebanyak 600 iklan/pariwara, atau dengan tingkat capaian 100%.
- Indikator Jumlah press release Pemerintah Aceh memuat informasi kegiatan pimpinan daerah baik dalam rapat maupun kunjungan kerja pimpinan daerah baik didalam maupun diluar daerah ditargetkan sebanyak 528 press release, atau dengan tingkat capaian 100%.

- Indikator Jumlah foto kegiatan pimpinan yang ditargetkan sebanyak 20.000 lembar, dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan, atau dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

Keberhasilan penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Aceh yang dimuat oleh media cetak dan media online merupakan salah satu bentuk pencitraan pemerintah yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya pelaksanaan penyebarluasan, publikasi dan transparansi informasi".

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya pelaksanaan penyebarluasan, publikasi dan aspirasi masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Meningkatnya pelaksanaan penyebarluasan, publikasi dan transparansi informasi	Media Penyampaian Informasi Pemerintah Aceh kepada masyarakat	1 web site	1 web site	100,00
rata-rata tingkat capaian kinerja					100,00

Sumber : LAKIP Biro Hubungan Masyarakat Setda Aceh Tahun 2014

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya pelaksanaan penyebarluasan, publikasi dan transparansi informasi" diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

- Indikator Jumlah Media Penyampaian Informasi Pemerintah Aceh kepada masyarakat yang ditargetkan sebanyak 1 web site, dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan, atau dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

Keberhasilan dalam penyampaian informasi terhadap kegiatan pemerintah daerah melalui media website, yang setiap harinya di kunjungi oleh masyarakat sehingga berbagai tanggapan ataupun masukan baik positif maupun negatif terhadap Pemerintah Aceh.

4. Sasaran Strategis "Meningkatnya koordinasi penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan".

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya koordinasi penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.	Meningkatnya koordinasi penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan	Jumlah pidato dan makalah yang disiapkan untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda serta yang mewakili	1800 Pidato	1580 Pidato	87,78
		Jumlah makalah yang disiapkan	150 Makalah	95 Makalah	63,33
		Jumlah buku kerja yang dicetak	500 Buah	500 Buah	100,00
rata-rata tingkat capaian kinerja					88,78

Sumber : LAKIP Biro Hubungan Masyarakat Setda Aceh Tahun 2014

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya koordinasi penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan" diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 88,78% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

- Indikator Jumlah pidato yang disiapkan untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda serta yang mewakili yang ditargetkan sebanyak 1800 Pidato, tidak dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1580 pidato, atau dengan tingkat capaian sebesar 87,78%. Belum optimalnya tingkat capaian rata-rata tersebut, antara lain disebabkan karena

pada tahun 2014 permintaan terhadap pidato pimpinan daerah tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan.

- Indikator Jumlah makalah yang ditargetkan sebanyak 150 makalah, tidak dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 95 makalah, atau dengan tingkat capaian sebesar 63,33%. Belum optimalnya tingkat capaian rata-rata tersebut, antara lain disebabkan karena pada tahun 2014 permintaan terhadap makalah pimpinan daerah tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan.
- Indikator Jumlah buku kerja yang dicetak yang ditargetkan sebanyak 500 buah, dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan, atau dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

5. Sasaran Strategis "Meningkatnya publikasi kegiatan pemerintah dan terpenuhinya aspirasi masyarakat".

Sasaran strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya publikasi kegiatan pemerintah dan terpenuhinya
aspirasi masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5.	Meningkatnya publikasi kegiatan pemerintah dan terpenuhinya aspirasi masyarakat	Jumlah Analisis berita yang dihasilkan	864 buah analisis berita	862 buah analisis berita	99,77
		Jumlah Kliping Koran yang dicetak	500 eks	500 eks	100
		Jumlah Leaflet yang dicetak	2500 lbr	2500 lbr	100
		Jumlah Poster yang dicetak	5000 lbr	5000 lbr	100
		Jumlah Baliho yang dicetak	3500 meter	3435 meter	98,14
rata-rata tingkat capaian kinerja					99,46

Sumber : LAKIP Biro Hubungan Masyarakat Setda Aceh Tahun 2014

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya publikasi kegiatan pemerintah dan terpenuhinya aspirasi masyarakat" diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 99,46% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

- Indikator Jumlah Analisis berita ditargetkan sebanyak 864 analisis berita, tidak dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 862 analisis berita, atau dengan tingkat capaian sebesar 99,77%. Belum optimalnya tingkat capaian rata-rata tersebut, antara lain disebabkan karena umumnya pemberitaan yang disampaikan oleh media adalah bersifat positif sehingga tidak perlu dilakukan analisis pemberitaan.
- Indikator Jumlah Kliping Berita, Leaflet dan Poster yang dicetak dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan, atau dengan tingkat capaian sebesar 100 %, keberhasilan ini didukung oleh media publikasi untuk menyebarluaskan setiap program/kegiatan strategis Pemerintah Aceh.
- Indikator Jumlah Baliho yang dicetak ditargetkan sebanyak 3500 baliho, tidak dapat direalisasikan sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 3.435 baliho, atau dengan tingkat capaian sebesar 98,14%. Belum optimalnya tingkat capaian rata-rata tersebut disebabkan karena kurangnya kegiatan pemerintah yang harus dipublikasikan melalui media baliho/spanduk.

C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.493.818.210,- yang dijabarkan dalam 4 program dan 7 kegiatan.

Target dan realisasi atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dapat dijabarkan dalam tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
PAGU DEFINITIF BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1.080.863.400	1.000.722.672	92.59%
	Program Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa			
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hubungan dengan Pers dan Masyarakat	4.073.970.810	4.021.659.120	98.72%
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wartawan dan Kerjasama dengan Media	500.616.000	476.100.600	95.10%
	Program Pengembangan Data dan Informasi			
4	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh	582.320.000	502.898.700	86.36%
	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat Serta Instansi Terkait			
5	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan	925.750.000	901.356.500	97.37%
6	Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat	935.698.000	775.648.800	82.90%
7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kehumasan	394.600.000	373.344.500	94.61%
	JUMLAH	8.493.818.210	8.051.730.892	94.80%

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator dan target kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh tahun 2012-2017.

Dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh menetapkan 5 sasaran strategis, 13 indikator dan target kinerja. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi dan rencana capaian yang telah ditetapkan, sehingga akan diperoleh hasil pengukuran yang objektif.

Berdasarkan akumulasi hasil pengukuran terhadap 5 Sasaran strategis dan 13 indikator kinerja diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **94,80%** atau dengan kategori tingkat capaian **Baik**, tingkat capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja yang relatif baik didukung dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Namun belum diikuti dengan tingkat capaian pada indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa hambatan/kendala, antara lain belum optimalnya penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan belum optimal, serta kompetensi SDM yang masih lemah.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan

dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Aceh.